

**PERAN POLITIK IDHAM CHALID DALAM NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1956-1984**

***THE POLITIC ROLE OF IDHAM CHALID IN LEADING NAHDLATUL ULAMA, 1956-1984***

Oleh : Suryawan Abdian Alim, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [suryawanalim@gmail.com](mailto:suryawanalim@gmail.com)

**Abstrak**

Pada masa kepemimpinan Idham Chalid menjadi Ketua Umum PBNU antara tahun 1956-1984 di Nahdlatul Ulama (NU), keputusan-keputusan politik beliau membawa pengaruh bagi perkembangan NU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: biografi Idham Chalid, perkembangan Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, dan Idham Chalid sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama antara tahun 1956-1984. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Idham Chalid berhadapan secara *vis-a-vis* dengan pemerintah pusat, baik Orde Lama dan Orde Baru. Sikap yang berbeda ditunjukkan NU untuk menghadapi dua orde tersebut. Semasa Orde Lama, Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU menerima tema politik Demokrasi Terpimpin. Sedangkan untuk Orde Baru, menjelang pemilu 1971, Idham Chalid memberikan instruksi-instruksi untuk memenangkan pemilu tersebut. Serta Idham Chalid menjadi tokoh utama pembentukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai akibat fusi dari partai-partai Islam untuk menghadapi dominasi pemerintah Orde Baru. Semasa kepemimpinan Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU berhasil mempertahankan NU dari serangan-serangan dari lawan politiknya.

**Kata Kunci:** *Idham Chalid, Nahdlatul Ulama, 1956-1984*

**Abstract**

As Idham Chalid served as “Ketua Umum PBNU” in 1956-1984, his political decisions had an influence on the development of NU. This study aims to know: the biography of Idham Chalid, the development of Nahdlatul Ulama as a political party, and Idham Chalid as Chair of the Nahdlatul Ulama in 1956-1984. The method used in this study is Historical Criticism method consisting of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that Idham Chalid as “Ketua Umum PBNU” succeeded in defending NU from interventions of political opponents. Idham Chalid is dealing with the central government, both the Old Order and the New Order. A different approach was shown by Nahdlatul Ulama in dealing with these two orders. During the Old Order, Idham Chalid accepted the theme of Guided Democracy politics. As in the New Order, closing to the 1971 election, Idham Chalid suggests some instructions that makes winning the election. And Idham Chalid became the main figure in the formation process of the United Development Party (PPP) as a result of the fusion of Islamic parties to face the dominance of the New Order government.

**Keyword:** *Idham Chalid, Nahdlatul Ulama, 1956-1984*

## PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) berdiri tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, dipelopori oleh ulama yang berpusat di pesantren-pesantren. Pembentukan NU sebagai sebuah organisasi keagamaan merupakan upaya peneguhan kembali sebuah tradisi keagamaan dan sosial yang sebenarnya telah melembaga dalam jaringan struktur dan pola kepemimpinan yang sudah mapan. Seiring berjalannya waktu, orientasi organisasi ini mengalami perubahan dari sosial keagamaan menuju orientasi politik.

Keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari. Posisi ulama yang berada di garis depan masyarakat Islam tidak hanya membuat mereka menjadi pemimpin informal yang menjaga kaidah agama, tapi juga para pemimpin politik, karena di Indonesia, hubungan antara politik dan Islam sangat erat. Upaya-upaya ulama direalisasikan dengan mendirikan pesantren sebagai pusat-pusat pendidikan Islam. Di sisi lain, kepentingan ulama dalam politik direalisasikan dengan keterlibatan mereka dalam partai politik. Segera setelah pemerintah mendorong pendirian partai politik, ulama NU bersama dengan anggota organisasi Islam yang lain mendirikan partai politik Islam,

Masyumi. Pada 1952, NU mengumumkan dirinya sebagai sebuah partai politik setelah konflik dengan kelompok Islam lain dalam Masyumi yang tidak dapat diselesaikan.<sup>1</sup>

Nahdlatul Ulama mengadakan Mukhtar ke-21 di Medan, Desember 1956. Persoalan calon Ketua Umum menjadi topik yang vital. Sebab peranan Tanfidziyah dalam hal berhubungan dengan pemerintahan memiliki dominasi lebih yang besar daripada Syuriah. Kriteria calon Ketua Umum PBNU harus mempunyai keterampilan dalam bidang politik maupun strategi selain juga harus alim agama Islam. Pada akhirnya, Idham Chalid terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.<sup>2</sup> Terpilihnya Idham Chalid dipandang sebagai orang yang mumpuni, dimana saat bersamaan juga menjabat sebagai Waperdam II Kabinet Ali-Roem-Idham.

Ditambahkan oleh M. Masyhur Amin, setelah keluar dari Masyumi, NU yang menjadi partai politik membutuhkan banyak tenaga terampil.

---

<sup>1</sup>Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 147-148.

<sup>2</sup>Maksoem Mahfoedz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Umum, 1982), hlm. 162-172.

Padahal, organisasi ini sebagian besar didominasi oleh alumni pesantren yang tidak banyak memiliki kader yang mumpuni dalam urusan politik. Maka, direkrutlah “orang-orang luar” masuk ke dalam NU. Di antaranya “orang luar” tersebut adalah Idham Chalid.<sup>3</sup>

Idham Chalid, awalnya seorang tokoh Masyumi Kalimantan Selatan. Dengan menjadi anggota Masyumi, Idham Chalid banyak berhubungan dengan orang-orang NU. Pada tahun 1952, Muktamar NU ke-19 di Palembang, memutuskan untuk keluar dari Masyumi. Idham Chalid turut serta berhijrah menuju NU untuk wahana politik selanjutnya. Keluarnya Idham Chalid juga dipengaruhi kedekatannya dengan Rais Aam NU saat itu, Wahab Hasbullah.

Ketika NU keluar dari Masyumi, Idham Chalid menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU yang bertugas mengikuti perkembangan politik. Pada tahun 1952 hingga 1954, Idham Chalid dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, lalu pada tahun 1954 hingga 1956 menjadi Ketua I PBNU. Dan puncaknya di Muktamar NU ke-21 di Medan 1956, mengantarkan Idham Chalid menjadi

Ketua Umum PBNU. Posisi ini dipegang Idham hingga Muktamar NU tahun 1984. Jadi, Idham Chalid menjabat sebagai pimpinan kaum *nahdliyin* selama 28 tahun.

## METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau.<sup>4</sup> Landasan utama metode sejarah ialah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah dan bagaimana menghubungkannya.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan proses pengumpulan atau menemukan sumber yang sesuai dengan tema sejarah yang akan diteliti. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Interpretasi merupakan tahapan untuk menafsirkan atau memberi makna dari fakta atau bukti sejarah. Dan terakhir, Historiografi

<sup>4</sup>Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

<sup>5</sup>William H. Frederick dan Soeri Soeroto. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 13.

<sup>3</sup>Masyhur Amin M, *NU Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al Amin, 1996), hlm. 72.

merupakan upaya menghubungkan secara logis antara satu fakta dengan fakta yang lainnya dalam bentuk tulisan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Idham Chalid

Idham Chalid anak sulung dari empat saudara yang lahir di Setui, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 1921.<sup>6</sup> Ada juga yang mengatakan 5 Januari 1922.<sup>7</sup>

Idham menghabiskan masa kecilnya di Amuntai. Di samping belajar agama kepada ayahnya, juga menuntut ilmu di Sekolah Rakyat. Setelah menamatkan sekolah dasarnya pada 1935, Idham remaja melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Rasyidiyyah.<sup>8</sup> Satu bakat yang kelak menjadikannya disegani banyak

kalangan adalah piawai berpidato.<sup>9</sup> Idham melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Gontor. Ia belajar di Gontor selama lima tahun: tiga tahun di *Kulliyatul Mu'allimin al Islamiyyah* dan dua tahun tingkat *Kweekschool Islam Bovenbouw* lulus tahun 1942.<sup>10</sup>

Disamping aktivitas sebagai pendidik, Idham Chalid juga menerjunkan diri ke dunia politik. Sebelum dikenal sebagai Ketua Partai Masyumi Kalimantan Selatan, beliau menjadi sekretaris Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) tahun 1946, satu tahun kemudian bergabung dengan Sarekat Muslimin Indonesia (SERMI). Satu tahun setelahnya bergabung ke Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK).<sup>11</sup> Pada 1950, Idham Chalid menjadi anggota DPR Sementara mewakili Masyumi untuk wilayah Kalimantan sampai pemilu 1955.<sup>12</sup>

<sup>6</sup>Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).

<sup>7</sup>Tim Majalah Berita Mingguan Tempo, *Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986).

<sup>8</sup>Muchlishon Rochmat, A., "KH Idham Chalid, Pendidikan, dan Petualangan," <http://www.nu.or.id/post/read/90228/kh-idham-chalid-pendidikan-dan-petualangannya>. diakses 14 Maret 2019 pukul 10:18 WIB.

<sup>9</sup>Ahmad Muhajir, *op.cit.*, hlm. 21.

<sup>10</sup>Idham Chalid, *Mendajung dalam Taufan*, (Jakarta: Endang dan Api Islam, 1966), hlm. 133.

<sup>11</sup>Ahmad Muhajir, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>12</sup>Idham Chalid (1966), *op.cit.*, hlm. 134.

Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, Idham memilih terlibat di NU. Kemudian aktif menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU.<sup>13</sup> Idham Chalid memulai karier di Jakarta dengan aktif di GP Ansor,<sup>14</sup> kemudian sebagai Ketua LP Ma'arif pada tahun 1952.<sup>15</sup> Pada tahun yang sama, ia diangkat PBNU sebagai Sekretaris Jenderal partai dan dua tahun kemudian, terpilih sebagai Wakil Ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955 ia memegang jabatan penting sebagai Ketua Lapunu. Karir politik Idham Chalid semakin meningkat ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-21 yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara, di bulan Desember tahun 1956.<sup>16</sup>

Selama memimpin NU, Idham Chalid menghadapi dua konflik internal yang cukup berarti. Pertama, perebutan kursi Ketua Umum NU dengan Subchan

ZE. Dan kedua, perbedaan pandangan dengan masa depan organisasi dengan ulama sepuh NU.

Idham Chalid dan Subchan ZE mengalami persaingan sengit untuk merebut pengaruh dan kekuasaan di tubuh NU. Subchan arah organisasi yang lebih modern, dinamis, dan inklusif. Tetapi gagasan ini mendapat penolakan dari kalangan "orang-orang tua" karena dianggap terlalu membahayakan NU.<sup>17</sup> Gerakan Subchan mencapai puncaknya pada pemilu 1971 dimana NU menempati urutan kedua setelah Golkar.

Puncak konflik antara Idham dan Subchan mencapai puncaknya ketika Muktamar NU ke-25 Surabaya. Subchan memiliki peluang besar menjadi Ketua Umum PBNU berkat sepak terjangnya selama ini. Namun, Bisri Syansuri, selaku *Rais Aam* PBNU, menolak duduk bersama dia di pimpinan teras NU.<sup>18</sup> Hasil berakhir dengan pemecatan Subchan ZE dari PBNU akibat hak veto Bisri Syansuri selaku *Rais Aam* NU tanggal 21 Januari 1972. Surat pemecatan ditandatangani Bisri

<sup>13</sup>Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hlm. 397.

<sup>14</sup>Tim Penulis Tempo, *op.cit.*, hlm. 99.

<sup>15</sup>Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, (Jakarta: Gelagar Media Indonesia, 2009), hlm. 400.

<sup>16</sup>Ahmad Muhajir, *op.cit.*, hlm. 41-42.

<sup>17</sup>Arief Mudatsir Mandan, "Berjuang untuk Demokrasi: Kiprah Subchan ZE Menjelang dan Awal Orde Baru", dalam *Tashwirul Afkar* (No. 4 Tahun 1999), hlm. 88.

<sup>18</sup>Nasir Tamara, "Sejarah Politik Islam Orde Baru", *Prisma* No. 5, Tahun XVII, 1988, hlm. 46.

Syansuri (*Rais Aam*), M. Dahlan (Ketua Dewan Partai) dan Idham Chalid (Ketua Umum PBNU). Pemecatannya memperoleh empati dan simpati dari struktural di daerah khususnya dari luar pulau Jawa. Secara umum mereka beranggapan bahwa pemecatan Subchan tidak etis.<sup>19</sup> Subchan sendiri tidak mengakui keputusan atas pemecatan dirinya.

Konflik kedua yang harus dihadapi Idham Chalid adalah dengan ulama-ulama sepuh NU. Berawal dari ketidaksenangan posisi mereka sebagai kekuatan oposisi terhadap rezim Orde Baru, mereka mulai berani mengkritisi kepemimpinan politik NU nasional di bawah Idham Chalid.<sup>20</sup> Klimaksnya terjadi pada 2 Mei 1982. Empat ulama Syuriah NU (As'ad Syamsul Arifin, Machrus Aly, Ali Makshum dan Masykur) bertandang ke rumah Idham Chalid. Hasil pembicaraan mengarah pada mundurnya Idham Chalid sebagai Ketua Umum NU.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>ANRI, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2193 dan 2198.

<sup>20</sup>Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1998), hlm. 176-177.

<sup>21</sup>Slamet Efendi Yusuf, Mohammad Ichwan Sjam dan Masdar Farid Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 87.

Kabar Idham Chalid mengundurkan diri akhirnya terdengar pada 6 Mei tahun itu. Selang beberapa waktu, Idham Chalid menarik kembali pernyataannya yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum NU.<sup>22</sup> Hal ini membawa massa NU bingung dan terpecah. Demikian juga pimpinan-pimpinan NU terbelah dua. Selama tiga bulan kasus Idham Chalid belum selesai. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Para Ulama tetap menganggap Idham Chalid sudah tidak lagi menduduki jabatan Ketua Umum PB NU. sedang para pendukung Idham Chalid menilai, dengan pencabutan pernyataan pengunduran diri tersebut, persoalan sudah selesai. Artinya, Idham tetap masih sebagai Ketua Umum PB NU.

Rekonsiliasi antara kelompok As'ad Syamsul Arifin dengan kelompok Idham Chalid diprakarsai oleh Ibu Wahid Hasyim yang dilakukan di Surabaya. Namun sebenarnya yang terjadi rekonsiliasi final antara kedua kelompok itu baru tercapai pada Muktamar NU di Yogyakarta tahun 1989.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>*Tempo*, 21 Agustus 1982.

<sup>23</sup>Mahrus Irsyam, "Islam di Indonesia: Pengembangan Organisasi dan Gerakan Pemikiran", dalam *Prisma* (No. 4, Tahun XIX 1990), hlm. 36.

## B. Nahdlatul Ulama: Arah Gerak Politik

Nahdlatul Ulama secara terbuka menyebut dirinya sebagai kelompok ulama penjaga terpeliharanya ajaran Islam Aswaja di Indonesia. Secara sederhana, Aswaja berarti penganut Sunnah Nabi dan para sahabatnya. Dalam bertindak politik NU mendasarkan tindakannya berdasarkan kaidah fikih Aswaja.

Beberapa kaidah fikih yang dijadikan pedoman NU, antara lain: menghindari terjadinya kerusakan terlebih dahulu daripada mencari kebaikan (*Dar al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*); syarat untuk dapat melakukan kewajiban menjadi kewajiban itu sendiri (*Ma la yatimm al-wajib bihi fa-huwa al-wajib*); dan apa yang tak mungkin terwujud seluruhnya, tak boleh ditinggalkan seluruhnya (aspek-aspek terpenting yang ada di dalamnya harus diperjuangkan) (*Ma la yudraku kullu la yutrakullu*).<sup>24</sup>

Orientasi politik NU dapat dilacak di awal masa berdirinya. NU telah mempelopori terbentuknya Majelis Islam Alaa Indonesia (MIAI) kemudian membantu Gabungan Politik Indonesia (GAPI) di masa Pemerintahan Kolonial

Hindia Belanda.<sup>25</sup> Di masa Pendudukan Jepang, NU bersama organisasi Islam lainnya mendirikan organisasi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Di awal kemerdekaan, ketika Agresi Belanda I mengancam hendak merebut kembali Indonesia, NU mengeluarkan Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang diputuskan melalui rapat konsul NU se-Jawa dan Madura yang mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil tindakan terhadap Belanda. Kiprah politik NU mulai transparan sejak bergabung dengan Masyumi yang kemudian menjadi partai politik.

NU sejak tanggal 1 Mei 1952 sesuai dengan keputusan Mukhtar di Palembang berubah menjadi partai politik yang mandiri, sebelumnya menjadi bagian dari partai Masyumi.<sup>26</sup> Semenjak menjadi partai politik sendiri, NU mendapat perlawanan dari berbagai unsur. Namun mereka tetap berjuang

<sup>25</sup>Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatayu, 1985), hlm. 134.

<sup>26</sup>Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 97-133; Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 85-92; Sidang-sidang PBNU secara lengkap lihat ANRI, *Nahdlatul Ulama 1948-1979*, No. 928 dan 999.

<sup>24</sup>Mahrus Irsyam, *Ibid.*, hlm. 38.

untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam. Arah politik NU harus berakhir di tahun 1984 melalui keputusan Mukhtar NU. NU menarik diri dari politik praktis kekuasaan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai “Kembali ke Khittah 1926”.

### C. Idham Chalid sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (1956-1984)

#### 1. Terpilih sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama

Idham Chalid mengawali menjabat sebagai Ketua Umum NU melalui putusan Mukhtar NU ke-21 di Medan tahun 1956. Mukhtar NU ke-22 pada 1959 berlangsung di Jakarta masih mengukuhkan Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU mendampingi Wahab Hasbullah sebagai *Rais Aam* PBNU. Mukhtar NU ke-23 pada 1962 di Surakarta masih mempertahankan duet kepemimpinan Idham Chalid dan Wahab Hasbullah. Pada 1967, diselenggarakan Mukhtar NU ke-24 di Bandung, Jawa Barat. Idham Chalid kembali terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Mukhtar NU ke-25 pada 1971 dilangsungkan di Surabaya. Popularitas Idham Chalid mulai menurun. Peserta mukhtar lebih memilih Subhan ZE sebagai calon Ketua Umum PBNU. Namun Bisri Syansuri kurang suka dengan Subhan. Kembali Idham Chalid

terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dengan Wahab Hasbullah sebagai *Rais Aam* PBNU.<sup>27</sup>

Mukhtar NU ke-26 tahun 1979 berlangsung di Semarang. Menjelang mukhtar tersiar kabar Idham Chalid tidak lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU. Oleh sebab itu, Achmad Syaichu segera mencalonkan diri menjadi pimpinan Tanfidziyah menggantikan Idham. Dan pada saat yang sama, Idham Chalid sedang menurun. Beberapa tokoh NU kecewa dengan kepemimpinan Idham Chalid yang dinilai lemah.

Laporan pertanggungjawaban Idham Chalid mendapat kritikan tajam dari peserta mukhtar (*mukhtamirin*). Idham Chalid tidak berusaha membela diri dengan mencari-cari alasan dan tidak menjawab serangan-serangan, tapi hanya meminta maaf dan mengakui atas kesalahan-kesalahannya.<sup>28</sup> Menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU, tiba-tiba muncul surat yang menyatakan bahwa Idham Chalid bersedia dicalonkan. Akhirnya Idham Chalid terpilih kembali

<sup>27</sup>Naskah Hasil Musyawarah Nasional dan Mukhtar NU Museum NU dan Perpustakaan NU.

<sup>28</sup>Lihat Mitsuo Nakamura dalam Greg Fealy dan Greg Barton (eds), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 95-119.

sebagai Ketua Umum PBNU hanya lantaran permohonan maaf sebagai jawaban atas kritik-kritik kepadanya, dan mendampingi Bisri Syansuri sebagai *Rais Aam* PBNU. Mukhtar Semarang menjadi ajang Idham Chalid terakhir sebagai Ketua Umum NU, sebab Mukhtar berikutnya di Situbondo 1984 tidak lagi mengukuhkan Idham Chalid sebagai Ketua Umum NU.

## 2. Idham Chalid dan Kebijakan Demokrasi Terpimpin

Tanggal 5 Juli 1957, Presiden Sukarno meresmikan Demokrasi Terpimpin. Tanggal 17 Agustus 1959, Soekarno mengumumkan ideologi Manipol-Usdek (UUD 45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Pada umumnya semua kiai tidak suka Demokrasi Terpimpin dan Nasakom. Menurut Greg Fealy, kalau NU tidak secara nyata mendukung Demokrasi Terpimpin akan sangat mengancam NU.<sup>29</sup> Sebagai Ketua Umum PBNU, Idham Chalid memberikan keterangan, “Kami (NU) tidak dapat berkomentar. Itu hak

presiden untuk menentukan cara mengamankan negara.”<sup>30</sup> Nahdlatul Ulama memang tidak setuju dengan sistem Demokrasi Terpimpin, namun mereka loyal terhadap Presiden Soekarno. Idham Chalid sendiri dalam mempertimbangkan keputusan untuk menerima Demokrasi Terpimpin mengikuti Rais Aam NU, Wahab Hasbullah.

## 3. Strategi Menghadapi Kebijakan Orde Baru

Tahun 1966, terjadi perubahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ada dua peristiwa nasional yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup NU, yakni pemilu 1971 dan fusi partai Islam.

Empat tahun setelah secara resmi menggantikan Soekarno sebagai Presiden RI, Soeharto menggelar pemilu pada 5 Juli 1971. Hajatan demokrasi nasional tersebut memilih anggota parlemen nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Menjelang Pemilu 1971, upaya memperoleh hasil yang diharapkan oleh pimpinan pusat NU dilaksanakan sebuah pelatihan untuk kader partai.<sup>31</sup> Ketua Umum, Idham

<sup>29</sup>Tim CRCS UGM, “Greg Fealy: Pertengkar Elit Politik Nahdlatul Ulama (1960-Hingga Kini)” <https://crcs.ugm.ac.id/id/wawancara/1426/greg-fealy-pertengkar-elit-politik-nahdlatul-ulama-1960-hingga-kini.html> diakses 13 Maret 2019 pukul 12:09 WIB.

<sup>30</sup>Greg Fealy, (*Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 73.

<sup>31</sup>Museum NU, No: 2027/Tanf/C/X/-169 tentang “Ketetapan

Chalid pada kampanyenya di Surabaya sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun GP Ansor dan Fatayat NU Jawa Timur, telah memberikan instruksi-instruksi menghadapi pemilu. Diantaranya menyerukan agar tetap memelihara aqidah Aswaja, mentaati ulama-ulama NU. Memelihara ketenangan berpikir maupun ucapan dan melaksanakan amanat presiden, jangan apatis, tetapi tingkatkan partisipasi dan kerja sama dengan semua aparat pemerintah, turut serta menjaga kerukunan nasional, memperbanyak takarub dan *amalliyah ubudiyah*, dll.<sup>32</sup> Berkat kerja keras dan sama antar elemen, NU memperoleh hasil yang memuaskan. Mereka memperoleh podium kedua dibawah Golkar.

Selain upaya memenangkan pemilu 1971, NU juga menghadapi isu perombakan struktur politik, penyederhaan partai dan perubahan orientasi pembangunan politik di Indonesia. Bagi NU penyederhanaan sistem partai itu mungkin akan membawa keuntungan dalam artian,

---

*Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama Pedoman Pokok Pendidikan Kader Partai.* Dan ANRI, *Nahdlatul Ulama 1948-1979*, No. 1025.

<sup>32</sup>Samsuddin A, dkk, *Pemilihan Umum 1971*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers, 1971), hlm. 90.

partai-partai kecil akan tersingkir namun risikonya juga besar, yaitu NU berada di bawah dominasi partai Islam yang lain.

Hasil perbincangan yang intensif, dibentuklah “Kelompok Persatuan Pembangunan” pada tanggal 13 Maret 1970, dimana anggotanya yang terdapat pada kelompok spiritual-materiil seperti yang telah disebutkan.

Melalui proses yang rumit, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipilih sebagai nama atas fusi empat partai Islam melalui “Deklarasi Penggabungan” tanggal 5 Januari 1973 bertempat dirumah Mintaredja SH. Deklarasi pendirian PPP diumumkan oleh Presidium Kelompok Persatuan Pembangunan yang ditandatangani Idham Chalid (NU), H.M.S. Mintaredja (Parmusi), Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti), dan Masykur (NU).<sup>33</sup>

Anggota-anggota PBNU sebenarnya tidak setuju menerima keputusan penggabungan diri ke dalam PPP tanpa bermusyawarah terlebih dahulu. Hal ini berakibat pada ketidakpuasan anggota yang lain walaupun akhirnya mereka setuju terhadap keputusan yang dibuatnya yang

---

<sup>33</sup>ANRI, *Nahdlatul Ulama 1948-1979*, No. 2624.

dianggap sebagai keputusan terbaik untuk kondisi politik waktu itu.<sup>34</sup>

#### D. Pemikiran Politik Idham Chalid

Pembahasan bagian ini berusaha menyederhanakan pemikiran politik Idham Chalid ke dalam tiga pemikiran. Pemikiran tersebut melingkupi pemikiran yang pernah Idham lontarkan sebagai hasil refleksi atas jabatan yang pernah diembannya. Antara lain:

##### 1. NU Sebagai Alat Perjuangan,

Menurut Idham, terjadi tiga tahapan NU. Pertama, periode Pembangkit, berlangsung antara awal berdirinya sampai 1935. Kedua, periode Pengatur, Menurut Idham periode ini berlangsung antara tahun 1935 hingga 1945. Penamaan periode pengatur menurutnya disebabkan gerak langkah organisasi diselaraskan dengan norma yang berlaku sebagai Organisasi Islam di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan militer Jepang, dan ketiga, Periode Partai. Menurut Idham, politik NU adalah berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan melalui dan menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan musyawarah. NU selalu berusaha mengatasi masalah dengan mencari jalan tengah, selama tidak

bersinggungan dengan ideologi dan keyakinan asasi organisasi

##### 2. Keparlemenan,

Idham Chalid pernah diangkat menjadi Ketua MPR RI antara tahun 1971-1977. Gagasan-gagasannya tentang roda pemerintahan yang baik perlu disertakan. Menurut Idham, bagi suatu negara yang rakyatnya belum mengerti dalam soal politik lebih baik jika menggunakan parlemen yang berdeewan

##### 3. Cita-Cita 'Izul Islam wal Muslimin.

Tugas utama seorang pemuka agama adalah berdakwah. Idham Chalid menggunakan organisasi sebagai wadahnya berdakwah keseluruhan umat Islam dengan tujuan akhir tercapainya kejayaan bagi umat Islam. Cita-cita itu ia coba manifestasikan *via* organisasi NU terutama saat menjadi partai politik. Perjuangan menegakkan cita-cita 'Izul Islam menurut Idham dapat ditempuh melalui perjuangan politik lewat partai.

#### KESIMPULAN

Idham Chalid berhasil membawa NU keluar dari masa-masa genting ketika dinamika politik nasional yang luar biasa bergejolak saat Indonesia masih berusia muda ini. Idham Chalid menjadi orang yang selalu berusaha menghindari berkonfrontasi

<sup>34</sup>Moh. Mahbub, "Kiprah Politik NU Pasca Khittah: Studi Hubungan NU dengan Negara (Dalam Perspektif State and Civil Society)", *Tesis*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), hlm 103.

dan tetap menjaga kepentingan NU di era Orde Lama maupun Orde Baru. Sikap dan pemikirannya didukung oleh sebagian besar tokoh-tokoh NU, terutama Wahab Hasbullah dan Saifuddin Zuhri. Adanya pihak-pihak yang tidak sepaham dengan Idham adalah hal yang lazim, apalagi dalam dunia politik. Bagi NU, Idham tetap merupakan aset penting dan sampai beberapa muktamar ia tetap terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah. Perdebatan dan pertarungan terbuka dimaknainya sebagai sebuah tradisi penerimaan perbedaan di antara para ulama yang berpegang pada fikih. Mengambil kalimat *fiḥ qaulani* (dalam tiap masalah ada dua pendapat) yang selalu mengiringi pembicaraan tentang fikih khususnya masalah mu'amalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Arsip/Dokument

- ANRI, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 237.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 613.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 928.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 999.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 1024.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 1025.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 1267.

- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 1973.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2193.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2198.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2295.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2452.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2425.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2446.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2574.
- \_\_\_\_\_, *Nahdlatul Ulama* 1948-1979, No. 2624.
- \_\_\_\_\_, Rekaman Suara (MP3), Dr. KH. Idham Khalid No. 83 Tahun 1985.
- \_\_\_\_\_, Rekaman Suara (MP3), Dr. KH. Idham Khalid No. 97 Tahun 1986.

Arsip Museum NU tentang Ketetapan Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama Pedoman Pokok Pendidikan Kader Partai.

- \_\_\_\_\_, tentang *Surat Edaran PBNU tentang Kebijakan Politik No. 421/Tanf/VII-57/Tgl 1 Juli 1957*.

\_\_\_\_\_, tentang *Keputusan Muktamar ke XXVII Nahdlatul Ulama*.

Dokumentasi Perpustakaan NU dan Museum NU tentang Naskah Hasil Musyawarah Nasional dan Muktamar NU.

##### Buku/Jurnal

- Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, 2011, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.

- Abdul Muchith Muzadi, 2006, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista.
- Ahmad Muhajir, 2007, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Arief Mudatsir Mandan, "Berjuang untuk Demokrasi: Kiprah Subchan ZE Menjelang dan Awal Orde Baru", dalam *Tashwirul Afkar* (No. 4 Tahun 1999), hlm. 80-91.
- Bibit Suprpto, 2009, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya, dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelagar Media Indonesia.
- Choirul Anam, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu.
- Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Endang Turmudi, 2004, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Fealy, Greg, 2009, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_ dan Greg Barton (eds), 2010, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto, 2017, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES.
- Idham Chalid, 1966, *Mendajung dalam Taufan*, Jakarta: Endang dan Api Islam.
- Mahrus Irsyam, "Islam di Indonesia: Pengembangan Organisasi dan Gerakan Pemikiran", *Prisma*, No. 4, Tahun XIX 1990, hlm. 31-48.
- Maksoem Mahfoedz, 1982, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Umum.
- Masyhur Amin M, 1996, *NU Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al Amin
- Nasir Tamara, "Sejarah Politik Islam Orde Baru", *Prisma* No. 5, Tahun XVII, 1988, hlm 37-63.
- Samsuddin A, dkk, 1971, *Pemilihan Umum 1971*, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Konsultasi Pers.
- Slamet Efendi Yusuf, Mohammad Ichwan Sjam dan Masdar Farid Mas'udi, 1983, *Dinamika Kaum Santri*, Jakarta: CV Rajawali.
- Tim Majalah Berita Mingguan Tempo, 1986, *Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986*, Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- van Bruinessen, Martin, 1998, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Zamakhsyari Dhofier, 2011, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

#### Internet

- Muchlishon Rochmat, A., "KH Idham Chalid, Pendidikan, dan Petualangan," <http://www.nu.or.id/post/read/90228/kh-idham-chalid-pendidikan-dan-petualangannya>. diakses 14 Maret 2019 pukul 10:18 WIB.
- Tim CRCS UGM, "Greg Fealy: Pertengkar Elit Politik Nahdlatul Ulama (1960-Hingga Kini)," <https://crs.ugm.ac.id/id/wawancara/1426/greg-fealy-pertengkar-elit-politik-nahdlatul-ulama-1960-hingga-kini.html> diakses 13 Maret 2019 pukul 12:09 WIB.

#### Tesis

- Moh. Mahbub, 1998, "Kiprah Politik NU Pasca Khittah: Studi Hubungan NU dengan Negara

(Dalam Perspektif State and Civil Society)”, *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga.

Syamsul Rahmi, 2017, “Peran KH Idham Chalid dalam Modernisasi Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Tahun 1945-1966 M”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

**Surat Kabar**

*Api Islam*, No. 2 Th. I Juli 1965, No. 4 Th. I Agustus 1965, No. 5 Th. I Agustus 1965, No. 6 Th. I Agustus 1965, No. 7 Th. I Agustus 1965.

*Aula* Tahun 1996.

*Harian Rakyat* 11 Mei 1963 dan 4 Februari 1955.

*Pandji Masyarakat* No 336 tahun 1981.

*Tempo* 12 September 1981, 19 Juni 1982, 21 Agustus 1982, 4 September 1982, 10 November 1984, 8 Desember 1984, 15 Desember 1984, 29 Desember 1984.

Yogyakarta, Desember 2019

Pembimbing TAS



Dr. Miftahuddin, M.Hum.  
NIP. 19740302 200312 1 006

Reviewer



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001